

**STRATEGI PENGELOLAAN PERSEDIAAN ASET BIOLOGIS
PADA SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN BUDI DAYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

Disusun oleh:

NAMA : DIDIET ADI NUGROHO
NPM : 2243021063
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2025**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Didiet Adi Nugroho
NPM : 2243021063
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Pengelolaan Persediaan Aset Biologis
Pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat
Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian
Kelautan Dan Perikanan
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : Inventory Mangement Strategy For Biological
Asset in Work Units Under the Directorate
General of Aquaculture, Ministry of Marine
Affairs and Fisheries

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan.
Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., Ph.D)

Pembimbing II



(Dr. Edy Sutrisno, M.Si)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Didiet Adi Nugroho
NPM : 2243021063
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Strategi Pengelolaan Persediaan Aset Biologis Pada
Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan
Budi Daya Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Mei 2025
Pukul : 13.00 s.d 14.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

PENGUJI TESIS :

Ketua Sidang : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si

Sekretaris : Dr. Hamka, MA

Anggota : Dr. Alih Aji Nugroho, S.A.P., M.P.A

Pembimbing 1 : Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., Ph.D

Pembimbing 2 : Dr. Edy Sutrisno, M.Si



SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didiet Adi Nugroho
NPM : 2243021063
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Pengelolaan Persediaan Aset Biologis Pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : Inventory Mangement Strategy For Biological Asset in Work Units Under the Directorate General of Aquaculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul **“Strategi Pengelolaan Persediaan Aset Biologis Pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan Dan Perikanan”** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini, saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan

Jakarta, Juni 2025



Didiet Adi Nugroho

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Strategi Pengelolaan Persediaan Aset Biologis pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan” dengan baik.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi pengelolaan persediaan aset biologis yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung operasional satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penelitian dan penulisan.
2. Pimpinan dan staf Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang telah memberikan kesempatan, data, serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
3. Rekan-rekan sejawat, kedua anakku Dhafin Adri Nugroho dan Shifan Adria Bintang, keluarga, dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan moral dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu manajemen keuangan negara, khususnya dalam konteks pengelolaan aset biologis di sektor perikanan budidaya.

Jakarta, Juni 2025

Didiet Adi Nugroho

ABSTRAK

Strategi Pengelolaan Persediaan Aset Biologis Pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan

Didiet Adi Nugroho
didiet.pbj@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor dan strategi pengelolaan persediaan aset biologis pada satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari permasalahan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ketidaktertiban dalam pencatatan persediaan, kelemahan pengendalian internal, serta kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola dan mencatat persediaan aset biologis, khususnya benih ikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi di tiga lokasi balai besar perikanan budidaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pengelolaan aset biologis mencakup penerapan aplikasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia dalam pemahaman prosedur pencatatan persediaan, serta belum adanya prosedur operasional standar khusus untuk pengelolaan aset biologis. Penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, pengembangan sistem informasi persediaan yang terintegrasi, serta penyusunan prosedur operasional standar yang komprehensif dan aplikatif sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan akurasi pelaporan keuangan.

Kata kunci: strategi pengelolaan, aset biologis, persediaan, sumber daya manusia, pengendalian internal

ABSTRACT

Inventory Management Strategy for Biological Assets in Work Units under the Directorate General of Aquaculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Didiet Adi Nugroho
didiet.pbj@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

This research aims to examine the factors and strategies for managing biological asset inventories within the work units under the Directorate General of Aquaculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. The background of this research arises from issues identified by the Audit Board of Indonesia (BPK), particularly related to irregularities in inventory recording, weaknesses in internal controls, and the lack of human resource competence in managing and recording biological asset inventories, especially fish seed stocks. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and document analysis at three major aquaculture centers. The results indicate that the main challenges in managing biological assets include the suboptimal implementation of inventory management applications, limited human resource capacity in understanding inventory recording procedures, and the absence of specific standard operating procedures (SOPs) for managing biological assets. This study recommends strategies such as enhancing human resource capacity through technical training, developing an integrated inventory information system, and formulating comprehensive and applicable standard operating procedures. These efforts aim to improve accountability and the accuracy of financial reporting.

Keywords: management strategy, biological assets, inventory, human resources, internal control

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Permasalahan.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	13
B. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	15
1. Tinjauan Kebijakan.....	15
2. Tinjauan Teori.....	23
C. Kerangka Berpikir.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Metode Penelitian.....	39
B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	40
C. Lokus Penelitian.....	42
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
E. Instrumen Penelitian dan Partisipan.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Penyajian Data dan Pembahasan.....	65
1. Faktor pengelolaan persediaan aset biologis pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya belum optimal.....	65
2. Strategi Pengelolaan Persediaan Aset Biologis.....	92
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	105
A. Simpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perincian Permasalahan Persediaan pada K/L Tahun 2021.....	5
Tabel 1.2 Persediaan Biota per 31 Desember 2022.....	7
Tabel 1.3 Biota Laut yang Belum Dicatat Sebagai Persediaan.....	7
Tabel 1.4 Perkembangan Kelemahan Pengendalian Internal LKPP.....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Kisi-kisi Pengumpulan Data.....	46
Tabel 4.1 Kesimpulan Hasil Wawancara.....	101

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	37
Gambar 3.1 Rangkaian analisis Data.....	43
Gambar 4.1. Kegiatan Pemijahan pada BBPBL Lampung.....	58
Gambar 4.2. Foto Udara (BBPBAT) Sukabumi.....	59
Gambar 4.3 Komoditas Udang pada BBPBAP Jepara.....	63
Gambar 4.4. Proses Stok Opname Persediaan Benih.....	74
Gambar 4.5 Kegiatan Kerja pada Komoditas.....	77
Gambar 4.6 Hatchery pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara.....	80
Gambar 4.7. Kegiatan Grading Persediaan Aset Biogis Berdasar Ukuran	85

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Perikanan budidaya sebagaimana bertanggung jawab dan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dapat menjadi “obat mujarab atau panacea” bagi kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial dalam pembangunan nasional. Dari sisi ekonomi usaha pembudidayaan ikan sudah tumbuh menjadi mata pencaharian utama sebagian masyarakat, lapangan pekerjaan dan usaha serta investasi. Usaha pembudidayaan ikan sangat beragam, meliputi skala usaha (industri/pengusaha hingga skala rumah tangga dan mikro), teknologi yang diaplikasikan, segmentasi usaha serta komoditas dan wadah budidaya. Produksi yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan pasar ekspor. Sehingga berkontribusi pada sosial-ekonomi masyarakat, perekonomian daerah dan nasional dari penerimaan pajak dan devisa. Usaha pembudidayaan ikan sejalan dengan ekonomi kerakyatan, karena skala usaha dan teknologi dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk mengaplikasikan. Penelitian yang ada komoditas perikanan budidaya berupa rumput laut juga berfungsi sebagai penyerap dan simpanan karbon sehingga berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim serta kesehatan lingkungan karena menghasilkan oksigen.

Sumber daya lahan perikanan budidaya yang tersedia namun belum dimanfaatkan secara optimal seharusnya dapat menjadi aset utama dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah maupun nasional. Untuk itu perlu perumusan strategi yang jitu, yang berpijak pada penelaahan mendalam mengenai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Setiap faktor berkenaan dengan usaha perikanan budidaya perlu terus diperhatikan, dibangun, dan dikembangkan agar mampu meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar global dan industrialisasi. Selain itu, pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan dengan lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu,

pengembangan sektor perikanan budidaya di masa depan harus dapat memanfaatkan potensi lahan secara optimal guna mendorong produksi yang berkelanjutan berbasis ekonomi rakyat, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor hasil perikanan budidaya, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

Memperhatikan potensi, keragaman kondisi saat ini dan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya, maka sangat beralasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan 1 dari 5 program terobosan yang terkait dengan perikanan budidaya. Program terobosan KKP terkait perikanan budidaya tersebut adalah pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat (air tawar) yang berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan dilaksanakan dengan bertahap, terstruktur, terpadu, serta berkelanjutan untuk memenuhi *goals* yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mencantumkan salah satu misi yang berkaitan dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, melalui peningkatan pemahaman masyarakat dan pemerintah tentang wawasan bahari, memperkuat mutu SDM yang memiliki perspektif kelautan, mengatur kawasan perairan nasional guna menjaga otonomi serta mendorong kesejahteraan, serta mengembangkan ekonomi maritim secara terintegrasi dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya laut yang dapat dipertahankan untuk jangka panjang.

Perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien sangat diperlukan dalam pembangunan perikanan budidaya untuk periode 2020–2024. Mengacu pada ketentuan dalam PP No. 17 Tahun 2017, rangkaian perencanaan dan penetapan anggaran tingkat negara harus diterapkan dengan pendekatan yang tematik, holistik, integratif, serta spasial, sesuai dengan prinsip *money follows program*. Mengingat masih adanya berbagai tantangan dan permasalahan, Ditjen Perikanan Budidaya perlu menyusun kembali kebijakan pembangunan lima tahun ke depan dengan

menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan. Dalam kebijakan ini, aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial harus menjadi pertimbangan utama, bukan hanya sekadar peningkatan produksi.

Penetapan orientasi kebijakan serta taktik dalam pembangunan perikanan budidaya telah mengarahkan target yang disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Sasaran tersebut dijabarkan melalui enam perspektif yang memiliki indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Langkah ini bertujuan untuk menghadapi tantangan global serta menyelesaikan berbagai isu yang membutuhkan transformasi pemikiran dan akselerasi rancangan pengembangan sektor budidaya perikanan.

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap kementerian diwajibkan membuat Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj ini bertujuan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap implementasi program serta kegiatan pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selain itu, LKj berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur hasil kerja yang diperoleh berdasarkan parameter yang telah diputuskan, guna menghasilkan kaidah manajemen administrasi kenegaraan yang akuntabel serta terbuka terhadap publik.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) ialah unit Eselon 1 pada KKP memiliki program prioritas yaitu menyuplai bibit ikan, bakal induk, serta ikan indukan bermutu kepada pembudidaya ikan dan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas usaha budidaya. Dalam praktek pengelolaan dan pencatatan persediaan benih ikan tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang pada akhirnya turut menyumbang temuan dalam laporan temuan pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). BPK menyampaikan bahwa Laporan

Kuangan KKP Tahun Anggaran 2019 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tetapi kemudian terjadi penurunan karena pada tahun 2020 KKP meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Di tahun 2021 KKP berhasil Kembali meraih opini WTP.

Penelitian ini dilakukan karena pengelolaan aset biologis pada satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, khususnya di tiga Balai Besar (BBPBAT Sukabumi, BBPBAP Jepara, dan BBPBL Lampung), menghadapi berbagai persoalan yang krusial dan berdampak langsung terhadap kualitas laporan keuangan serta efektivitas pengelolaan sumber daya. Ketiga lokus mencerminkan kompleksitas pengelolaan aset biologis di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BPK mengutarakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2019 meraih opini WTP dan berlanjut sampai dengan tahun 2021 yang selalu mendapat WTP. Opini yang diberikan didasarkan pada beberapa aspek, seperti kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal (BPK, 2021). Walaupun memperoleh opini WTP secara konsisten, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan. Tindak lanjut terhadap evaluasi Sistem Pengawasan Internal dan Kesesuaian dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengungkapkan adanya 27 isu yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah sistem pengelolaan persediaan dan infrastruktur pendukungnya yang belum sepenuhnya mampu menyajikan laporan persediaan secara akurat (BPK, 2021). Hal ini antara lain disebabkan oleh operator aplikasi persediaan yang belum sepenuhnya menerapkan prosedur yang telah ditetapkan, serta masih adanya kelemahan pengendalian dalam pengelolaan persediaan di berbagai Kementerian/Lembaga.

Temuan pemeriksaan pada LKPP Tahun 2021 (audited), BPK masih

mengidentifikasi adanya kekurangan terhadap pencatatan provisi pada Kementerian/Lembaga melalui perincian berikut:

Tabel 1.1

Perincian Permasalahan Persediaan pada K/L Tahun 2021

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Persediaan Tidak Dilakukan Stock Opname	9	1.110.526.610,00	Permasalahan berulang pada 1 KL
2	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib	38	53.494.359.695,00	Permasalahan berulang pada 13 KL
3	Pemindahtanganan Persediaan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah Belum Tertib	9	1.052.044.338.098,00	Permasalahan berulang pada 4 KL
4	Permasalahan Signifikan Lainnya	16	4.826.889.985,00	Permasalahan berulang pada 4 KL
Jumlah			1.111.476.114.388,00	

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan RI (2021)

BPK mengajukan anjuran terkait defisiensi dalam pengawasan internal serta ketidaksesuaian terhadap regulasi yang berlaku dengan mengusulkan tindakan perbaikan kepada pemerintah, melalui Menteri Keuangan, selaku perwakilan pihak eksekutif, bertujuan untuk mengoptimalkan mekanisme informasi dalam administrasi pengelolaan inventaris di instansi pemerintahan. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan risiko penyimpangan serta memastikan akurasi dalam pelaporan persediaan. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa sejak tahun 2021 pemerintah telah menerapkan pencatatan persediaan menggunakan metode FIFO sebagai bagian dari implementasi PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Pemerintah terus mengembangkan Aplikasi Persediaan guna memastikan pencatatan FIFO dapat diterapkan secara menyeluruh. Selain itu, dilakukan penelusuran terhadap perbedaan saldo persediaan dengan meminta kementerian/lembaga mengidentifikasi serta menganalisis selisih yang terjadi. Ketidakesuaian tersebut disebabkan oleh satuan kerja yang tidak melaksanakan

prosedur dengan benar, sehingga perhitungan ulang berdasarkan FIFO tidak dapat dilakukan secara optimal. Koreksi terhadap perbedaan saldo persediaan akan dimasukkan dalam laporan keuangan. Untuk meningkatkan kualitas administrasi, pemindahtanganan, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk persediaan, pemerintah akan memperkuat peran APIP kementerian/lembaga serta mendorong perkembangan kompetensi SDM yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tersebut.

Kendala pencatatan persediaan benih tersebut muncul karena operator persediaan kesulitan mencatat kapan benih ikan tersebut diakui, kemudian juga kesulitan dalam pengungkapan persediaan sesuai dengan perubahan/ transformasi persediaan benih tersebut. Aplikasi persediaan yang biasa digunakan untuk mencatat persediaan pun masih terdapat beberapa permasalahan misalnya belum mengakomodasi perubahan satuan ekor pada benih ikan berubah menjadi satuan kilo pada induk ikan.

Selain perihal pengembangan aplikasi, penyebab temuan BPK antara lain karena operator aplikasi persediaan tiap Satuan Kerja belum seluruhnya menerapkan prosedur yang diresmikan. Hal tersebut membuktikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) operator Aplikasi Persediaan yang masih kurang. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan pun, khususnya mengenai teknis pengoperasian SAKTI dirasa masih kurang. Sehingga harapan penggunaan sistem terintegrasi yang akan membantu menyelesaikan kelemahan aplikasi persediaan lama pun justru menimbulkan permasalahan baru.

Pemeriksaan secara uji petik atas persediaan Biota Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara serta pengujian fisik persediaan di lapangan menunjukkan kondisi Perhitungan fisik Persediaan Biota per 31 Desember 2022 belum memadai karena ada persediaan yang belum dicatat. Berdasarkan laporan persediaan 31 Desember 2022 BBPBAP Jepara memiliki saldo biota laut sebagai berikut:

Tabel 1.2 Persediaan Biota per 31 Desember 2022

No.	Persediaan Aset Biologis	Nilai Persediaan (Rp)
1	Induk Nila Sultana Merah	11.455.000,-
2	Calon induk Udang Merguensis	4.524.000,-
3	Calon Induk Udang Vaname Jantan	5.250.000,-
4	Calon Induk Udang Vaname Betina	5.570.000,-
5	Induk Udang Putih Lokal Janta	12.000.000,-
6	Induk Udang Putih Lokal Betina	12.000.000,-
	Jumlah	50.799.000,-

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan RI (2023)

Sedangkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 1 Februari 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat biota yang belum dilaporkan sebagai persediaan per tanggal 31 Desember 2022 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.3 Biota Laut yang Belum Dicatat Sebagai Persediaan

No.	Persediaan Aset Biologis	Jumlah
1	Calon Induk Nila Sultana Merah	20.000 ekor
2	Induk Bawal Bintang	28 ekor
3	Benih Bawal Bintang	4.520 ekor
4	Magot	Tidak dapat dihitung

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan RI (2023)

Hal tersebut disebabkan karena Pengelola Kelompok Kerja (Pokja) tidak memiliki catatan maupun kartu stok dan tidak mencantumkan informasi lokasi kolam/bak biota tersebut, sehingga tidak dapat diketahui jumlah biota per 31 Desember 2022. Dengan demikian, tidak dilakukan koreksi saldo persediaan per 31 Desember 2022.

Kompetensi menjadi salah satu aspek krusial yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam mencapai kinerja optimal. Dalam lingkungan organisasi, kompetensi berperan penting dalam memutuskan pencapaian institusi dalam beradaptasi dengan dinamika yang terjadi (BPKP, 2015). Syafarudin (2008) dalam penelitian Made Ayu dkk. (2014) mengungkapkan bahwa kualitas SDM merupakan elemen utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi dan komitmen pegawai,

baik secara individu maupun kelompok, sangat diperlukan untuk mencukupi keperluan organisasi. Integrasi kompetensi tersebut ke dalam sistem manajemen organisasi juga menjadi faktor pendukung utama. Karakteristik dan kualitas pegawai yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tidak dapat dipisahkan dari tantangan persaingan yang dihadapi, baik masa kini maupun di masa mendatang. Selain itu, dokumen finansial wajib dirancang oleh SDM yang memiliki keahlian di sektor akuntansi agar dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan.

Berdasarkan penelitian Febriady (2013) dalam jurnal yang ditulis oleh Agum Gumelar (2017), pengelolaan keuangan daerah yang efektif memerlukan Satuan Kerja dengan SDM yang kapabel. Kapabilitas tersebut mampu dicapai melalui latar pendidikan akuntansi, partisipasi dalam pelatihan, dan pengalaman di bidang keuangan. Dengan demikian, individu yang terlibat dalam sistem akuntansi akan lebih mudah memahami konsep dan logika akuntansi. Sebaliknya, jika sumber daya manusia pemerintah tidak mampu memahami serta menerapkan prinsip akuntansi dengan baik, maka akan berisiko menimbulkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dan menyebabkan ketidaksesuaian dengan tolak ukur yang telah diputuskan pemerintah. Dengan demikian, agar laporan keuangan memiliki kualitas yang baik, penyusunannya mesti dilaksanakan oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi memadai, sehingga proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan tolak ukur yang berlaku. SDM dengan kompetensi tinggi berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang bermutu (Setyowati dkk., 2016). Salah satu kendala yang kerap terjadi adalah kurangnya kesiapan SDM dalam menjalankan aplikasi

Implementasi sistem informasi dan kompetensi SDM berperan untuk menentukan mutu laporan keuangan (Nurillah, 2014). Namun, selain itu, ada aspek lain yang turut memengaruhi mutu laporan keuangan, yakni pengendalian internal. Pengendalian internal berperan dalam menjaga keamanan aset, memastikan ketepatan pengelolaan informasi, serta menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang diterapkan, sehingga laporan keuangan dapat

dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya (Wadiyo, 2019). Dalam proses penerbitan opini, BPK menjadikan pengendalian internal sebagai salah satu aspek penilaian. Pada LKPP tahun 2021, BPK mengidentifikasi 27 kelemahan dalam pengendalian internal. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020.

Tabel 1.4
Perkembangan Kelemahan Pengendalian
Internal LKPP Tahun 2017 – 2021

Periode LKPP	Opini	Jumlah Kelemahan
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	13
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	19
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	26
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	26
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	27

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan RI (2021)

Penerapan sistem informasi, kapabilitas sumber daya manusia, serta mekanisme kontrol internal diantisipasi dapat memfasilitasi penyusunan laporan finansial yang bermutu tinggi, meskipun aspek ini tetap memerlukan validasi melalui riset lebih mendalam. Sejumlah studi telah meneliti kualitas laporan keuangan pemerintah. Bertolak belakang dari penelitian sebelumnya, riset ini menyatukan berbagai variabel yang telah dieksplorasi dalam kajian sebelumnya dan berupaya memvalidasi temuan-temuan terdahulu dengan menitikberatkan pada aspek permasalahan serta variabel dalam sistem informasi yang lebih terperinci.

Melihat hasil penelitian terdahulu maka perlu adanya model pengelolaan persediaan aset biologis pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya agar pengelolaan berjalan secara optimal, maka peneliti melakukan penelitian dengan topik **“Strategi Pengelolaan Persediaan Aset Biologis Pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks masalah di atas, permasalahan yang dapat diangkat antara lain:

1. Temuan BPK terkait sistem informasi pendukung dan pengelolaan persediaan masih belum mampu sepenuhnya memastikan pelaporan persediaan yang valid. Hal ini terjadi akibat ketidakkonsistenan operator Aplikasi Persediaan dalam menerapkan prosedur yang telah ditetapkan serta adanya kelemahan dalam mekanisme pengendalian persediaan di berbagai Kementerian/Lembaga.
2. Salah satu rekomendasi yang diberikan oleh BPK terkait permasalahan kelemahan dalam pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah mendorong pemerintah, melalui Menteri Keuangan sebagai perwakilan pemerintah, untuk meningkatkan sistem informasi dalam pengelolaan persediaan di kementerian/lembaga. Hal ini bertujuan meminimalkan dampak penyelewengan serta meningkatkan akurasi dalam pelaporan persediaan.
3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPB KKP) masih mempunyai kendala dalam pengelolaan dan pencatatan persediaan benih yang pada akhirnya turut menyumbang temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.
4. Kemampuan SDM Operator persediaan yang masih belum memadai, dikarenakan kurangnya pelatihan mengenai SAKTI.
5. BPK mengidentifikasi sebanyak 27 kelemahan dalam pengendalian internal pada LKPP tahun 2021, sementara pada LKPP tahun 2020 dan 2019 masing-masing ditemukan 26 kelemahan dalam aspek yang sama.

Mengingat begitu luas dan kompleksnya aspek dalam pengelolaan persediaan aset biologis, maka perlu diketahui bagaimana pengelolaan aset biologis yang telah berjalan pada Satuan Kerja untuk kemudian diketahui aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi, sehingga dapat disusun model pengelolaan persediaan aset biologis agar pengelolaan berjalan secara optimal.

C. Rumusan Permasalahan

Permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini dijabarkan antara lain:

1. Mengapa pengelolaan persediaan aset biologis pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya belum optimal?
2. Bagaimana strategi pengelolaan persediaan aset biologis agar pengelolaan optimal?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan mendapatkan solusi atas permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Berikut penjabarannya:

1. Menganalisis mengapa persediaan aset biologis pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya belum optimal.
2. Menyusun strategi pengelolaan persediaan aset biologis agar pengelolaan optimal.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan referensi dalam studi terkait sistem pelaporan keuangan pemerintah serta dapat dijadikan dasar dalam penyusunan riset lainnya di masa mendatang.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini berfungsi sebagai sarana edukasi dalam memperluas wawasan penulis, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara, serta dapat dijadikan referensi dalam penyusunan karya ilmiah lain di masa depan.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh lembaga dalam merumuskan keputusan, khususnya terkait dengan regulasi mengenai

sistem informasi akuntansi, mutu tenaga kerja, mekanisme pengawasan internal, serta aspek-aspek lain yang berhubungan dengan manajemen stok aset biologis, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat akurasi laporan keuangan yang disusun.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengelolaan persediaan aset biologis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta memperhatikan temuan lapangan, literatur, dan peraturan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan persediaan aset biologis (benih ikan) belum berjalan optimal. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Teknologi dan Digitalisasi Penerapan sistem digital belum berjalan optimal. Beberapa balai masih mengandalkan pencatatan manual, belum ada sistem real-time, dan belum tersedia metode digital yang efektif untuk mencatat perpindahan stadia benih.
2. Kelemahan Pengendalian Internal Tidak adanya tim pengawasan internal khusus, lemahnya supervisi dan evaluasi rutin, serta belum optimalnya pelaksanaan audit menyebabkan pengendalian internal belum berjalan maksimal.
3. Keterbatasan SDM Terbatasnya jumlah dan kompetensi staf, rangkap tugas, serta minimnya pelatihan teknis dan pemahaman tentang akuntansi aset biologis dan Aplikasi menyebabkan kesalahan pencatatan dan pelaporan.
4. Kendala Regulasi dan SOP Regulasi yang kompleks dan sering berubah belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana. SOP tidak disesuaikan dengan dinamika biologis benih, dan belum tersedia metode konversi satuan yang baku dari ekor ke kilogram.
5. Karakteristik Biologis Benih Ikan Perubahan fisik dan nilai benih (dari larva hingga induk) belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga laporan keuangan sering tidak mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

Adapun strategi optimalisasi pengelolaan yang disepakati oleh narasumber di tiga balai meliputi:

1. Peningkatan Koordinasi Lintas Bagian Melakukan rapat rutin antara bagian produksi, administrasi, dan keuangan untuk menyinkronkan data dan menyelesaikan permasalahan pencatatan.
2. Integrasi Sistem Administrasi, Keuangan, dan Produksi Optimalisasi Aplikasi sebagai sistem pencatatan terintegrasi serta pertimbangan penerapan teknologi seperti real-time tracking dan blockchain.
3. Penerapan Model Manajemen Persediaan Efisien Penerapan konsep real-time tracking agar pengelolaan persediaan menjadi adaptif dan responsif terhadap kebutuhan operasional.
4. Penyusunan SOP Sederhana dan Adaptif Menyusun SOP pencatatan yang modular dan sesuai dengan siklus hidup benih, disosialisasikan secara berkala kepada seluruh staf.
5. Audit dan Evaluasi Rutin Melaksanakan audit internal dan eksternal secara berkala, serta membentuk tim pengawasan untuk mengevaluasi sistem dan meningkatkan kepatuhan.
6. Peningkatan Kapasitas SDM Mengadakan pelatihan teknis berkala yang melibatkan akademisi, dengan fokus pada pencatatan aset biologis, konversi satuan, serta aplikasi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, berikut adalah saran strategis dan aplikatif untuk mengoptimalkan pengelolaan persediaan aset biologis, khususnya benih ikan, pada satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya:

1. Sistem Pencatatan Digital Berbasis Stadia Biologis dan Konversi Satuan Aplikasi perlu ditingkatkan fungsinya agar mampu mencatat pergerakan dan transformasi biologis benih ikan, misalnya dari satuan "ekor" saat larva menjadi "kilogram" saat induk. DJPB dapat mengembangkan aplikasi pendukung

internal yang terintegrasi melalui dashboard antarmuka sederhana. Tindak lanjut yang disarankan: Tim TI DJPB bekerja sama dengan operator pencatatan dan teknisi balai untuk merancang template standar pencatatan konversi.

2. Susun dan Terapkan SOP Modular Khusus Aset Biologis dengan Panduan Visual SOP pengelolaan aset biologis harus dirancang dalam bentuk modul per tahapan siklus hidup benih: pemijahan, pendederan, pendewasaan, dan distribusi. Setiap modul dilengkapi dengan contoh format, foto/ilustrasi, dan studi kasus singkat, agar mudah dipahami oleh pelaksana teknis di lapangan. Tindak lanjut yang disarankan: Balai menyusun tim teknis dan administrasi untuk merevisi SOP eksisting dan uji coba SOP baru selama satu siklus produksi.
3. Bentukkan Tim Pengendali Internal Aset Biologis per Balai dengan Jadwal Monev Wajib Balai perlu membentuk Tim Pengendali Aset Biologis yang terdiri dari unsur teknis, administrasi, dan keuangan. Tim ini bertugas melakukan stock opname, verifikasi, dan audit mini secara rutin terhadap data fisik dan data sistem. Tindak lanjut yang disarankan: Kepala Balai menetapkan tim melalui SK internal dan menyusun checklist evaluasi berbasis risiko.
4. Tingkatkan Kompetensi SDM melalui Skema Pelatihan Terstruktur dan Sertifikasi Internal DJPB perlu menyusun kurikulum pelatihan internal berjenjang terkait pengelolaan aset biologis dan sistem informasi pencatatan. Tindak lanjut yang disarankan: Penyelenggaraan pelatihan dalam bentuk on the job training dan pelatihan daring yang wajib diikuti oleh operator aset dan teknisi.
5. Lakukan Evaluasi Tahunan dan Penilaian Kinerja Pengelolaan Aset Biologis per Balai DJPB dapat mengembangkan indikator kinerja pengelolaan aset biologis (misalnya: tingkat kecocokan antara laporan sistem dan fisik, waktu tunggu penginputan, persentase keberhasilan audit). Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun sebagai dasar perbaikan dan pengambilan keputusan. Tindak lanjut yang disarankan: DJPB menetapkan standar kinerja dan sistem

penilaian berbasis dokumen dan observasi lapangan.

6. Fasilitasi Kolaborasi dan Pertukaran Pengetahuan antar-UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dapat membentuk forum koordinasi atau kelompok kerja antar-UPT sebagai sarana berbagi praktik terbaik, pengalaman lapangan, dan penyelesaian masalah. Dengan adanya kolaborasi ini, disparitas antar satuan kerja dapat ditekan dan kualitas tata kelola meningkat secara kolektif.
7. Penelitian Lanjutan dalam Pengembangan Model Manajemen Aset Biologis Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan model pengelolaan aset biologis berbasis teknologi, seperti sistem informasi terintegrasi yang mampu menangkap dinamika aset secara real-time. Selain itu, perlu juga dikaji integrasi antara laporan keuangan dan kinerja output, guna memperkuat pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Dengan implementasi strategi dan kebijakan yang tepat berdasarkan saran-saran tersebut, diharapkan pengelolaan persediaan aset biologis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dapat berlangsung secara efisien, transparan, dan akuntabel. Model pengelolaan yang baik tidak hanya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat daya saing sektor perikanan Budi Daya Indonesia dalam skala nasional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Agum Gumelar. (2017). *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021*. BPK RI.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Pedoman penyusunan kompetensi jabatan fungsional auditor*. Jakarta: BPKP.
- Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago Press.
- Berger, A. (2014). *Financial Management: Theory and Practice* (dikutip dalam Niedar dkk., 2022).
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2012). *Fundamentals of Financial Management* (dikutip dalam Niedar dkk., 2022).
- Bryson, J. M. (2011). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Gapenski, L. C., & Reiter, K. L. (2016). *Healthcare Finance: An Introduction to Accounting and Financial Management* (dikutip dalam Niedar dkk., 2022).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D., & Haryoso. (2019). *Peranan Sistem Pengendalian Internal dan Teknologi Informasi dalam Menentukan Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Surakarta*. Jurnal Akuntansi Publik.

- Niedar, H., dkk. (2022). *Manajemen Keuangan dalam Organisasi Publik*. Pustaka Akademik.
- Nurillah, A. (2014). *Pengaruh Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Auditing.
- Romanti, T. (2018). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kapasitas SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi Keuangan Publik.
- Setyowati, R., dkk. (2016). *Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Syafarudin. (2008). Dikutip dalam: Made Ayu dkk. (2014). *Pengaruh Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai*. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia.
- Wadiyo. (2019). *Peran Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Wahyuni, E., & Khoirudin, M. (2020). *Akuntansi Aset dan Aset Biologis*. Penerbit Ekuilibrium.
- Wulandari, R. (2018). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Perusahaan Sektor Perkebunan yang Terdaftar di BEI*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis.

Peraturan

- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2018 tentang Penerapan Awal Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005–2025.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A